

Nilai-Nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Nurhasanah
(Peneliti Independen)
Email: nunununo22@gmail.com

Abstract

This study was conducted with the aim to know how the influence of local values on the leadership of Tanarigella village head by looking at the village head's understanding of local values that include adele (fair), lempu (honest) and getteng (firm) and the application of local values to the leadership of the village head in the field of services in the village of Tanarigella. The type of this research used is deskriptif analysis that give a systematic social overview, factual and accurate about obtained in the field. Data collection used the techniques of observation, interview, and documentation. The results of the research indicate that the village head understands local values that are adele, lempu and getteng. Then teh application of the three local values in the leadership of the village head is implemented in three forms of service, namely publik services in the form of provision of public goods and public service, second development services in the form of physical and non-physical development ant third protection services as the village goverment's efforts to provide a sense of security and peace to the community.

Keywords: local values, leadership, village heads

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai lokal terhadap kepemimpinan Kepala Desa Tanarigella, dengan melihat pemahaman Kepala Desa terhadap nilai-nilai lokal yang mencakup adele (adil), lempu (jujur) dan getteng (teguh), dan penerapan nilai-nilai lokal tersebut terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam bidang pelayanan di Desa Tanarigella. Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu tipe yang memberikan gambaran sosial secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memahami nilai-nilai lokal yaitu adele, lempu dan getteng tersebut dengan baik. Kemudian penerapan ketiga nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk pelayanan yaitu pelayanan publik berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan publik, kedua pelayanan pembangunan berupa pembangunan fisik dan non-fisik dan ketiga pelayanan perlindungan sebagai upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat.

Kata kunci: nilai-nilai lokal, kepemimpinan, kepala desa

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang sangat luas dibagi dalam beberapa daerah provinsi dan

provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Dengan banyaknya wilayah yang terdapat di

Indonesia tentu juga akan menimbulkan beberapa isu bahkan masalah yang terjadi, baik masalah di bidang sosial, ekonomi, hukum bahkan mengenai pemerintahan. Salah satu isu sentral dalam dinamika pembangunan politik dan kehidupan sosial ini adalah kepemimpinan. Permasalahan yang timbul kemudian adalah munculnya berbagai sorotan publik terhadap kinerja pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di tingkat desa.

Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki peranan sentral di desanya sesuai dengan kewenangan otonom yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, di era pembaharuan desa seperti sekarang ini maka penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakatnya, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya agak berbeda dengan kepemimpinan pejabat lainnya di pemerintahan seperti Lurah, Camat, Bupati/Walikota ataupun Gubernur yang umumnya lebih banyak terikat pada dimensi struktural, sedangkan Kepala Desa selain terikat secara struktural sehubungan dengan kedudukannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, juga memiliki peranan fungsional sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan dan pemimpin adat.

Setiap desa memiliki adat istiadat dan nilai budaya lokalnya tersendiri. Hal ini berdasarkan karena wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, bahasa, etnis dan budaya sehingga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Dalam kehidupan masyarakat yang multikultural ini, kemajemukan tidak saja menyiratkan adanya

perbedaan-perbedaan, tetapi juga di dalamnya mengandung interaksi timbal-balik antar Kepala Desa dengan masyarakatnya dan atau sesama anggota masyarakat.

Pada kondisi masyarakat seperti itu, masalah yang biasanya timbul adalah sulitnya mencapai kesepakatan dalam meletakkan landasan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai, ditambah dengan semakin berkurangnya etika moralitas, hal ini berkaitan dengan semakin deras arus perubahan dan kuatnya dampak globalisasi yang dapat berakibat negatif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan dalam lingkup pemerintahan itu sendiri. Tampak bahwa lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat mengakibatkan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya global yang negatif sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai lokal yang positif.

Dalam hal ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin sangat dibutuhkan sebagai teladan dan dapat mengayomi masyarakatnya untuk tidak terkena dampak negatif dari arus globalisasi tersebut dengan tetap menghargai dan memegang teguh adat istiadat dan nilai-nilai lokal di daerahnya. Dari beberapa diantara kekayaan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kerajaan Luwu. Beberapa ajaran dari Kerajaan Luwu (Sawerigading) masih dipegang oleh sebagian pemangku adat. Ajarannya antara lain yaitu *adele* (adil), *lempu* (jujur) dan *getteng* (teguh).

Namun seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin meningkat, budaya asing yang menghegemoni mengakibatkan lunturnya nilai-nilai lokal tersebut. Proses ini berlangsung tanpa disadari sehingga dampak yang dapat ditimbulkan adalah semakin melemahnya etika dan moralitas masyarakat Luwu khususnya Desa Tanarigella dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan lunturnya nilai-nilai lokal yang

seharusnya menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan, kini hanya sebatas pengetahuan awam, bahkan ironisnya nilai-nilai budaya lokal dapat terlupakan. Maka dari itu, menemukan kembali identitas budaya Luwu menjadi tugas yang dilakukan bukan hanya pada generasi muda saja namun semua elemen masyarakat, pemerintah, terkhusus Kepala Desa di Desa Tanarigella. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di Desa Tanarigella mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai lokal di desanya. Selain tetap terus mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelestarian peninggalan budaya Kerajaan Luwu, Kepala Desa juga harus melakukan pendekatan kepada setiap lapisan masyarakat terutama para pemuda agar tetap menanamkan nilai-nilai lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Kepala Desa tentang nilai-nilai lokal *adele*, *lempu* dan *getteng* serta penerapan ketiga nilai lokal tersebut terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam bidang pelayanan di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang tentang pola kemitraan Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial pemerintah dalam program pembinaan anak jalanan di kota Makassar. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah

ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kepala Desa Tanarigella tentang Nilai-nilai Lokal

Pemahaman diartikan bahwa pemahaman adalah suatu cara atau proses memahami sebuah konsep yang diawali dengan pengetahuan, penerjemahan/penafsiran dan memaknai secara ekstrapolasi. Kemudian dari proses pemahaman itu lalu diwujudkan dalam bentuk tindakan atau pelaksanaan daripada konsep tersebut.

Secara harfiah, kata *adil* berasal dari bahasa Arab *adil* yang berarti di tengah. *Keadilan* berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain *adil* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsepkepemimpinan raja-raja Luwu sejak dahulu bersandar pada filosofi yangdikemukakan oleh I Sehe Makkunrai yaitu: "*Aro adele agaukeng de' na mappile pile na pappada ngasengngi tauwede. Siwennimi adele mapparenta datu-e padami patappulo wennisempajangnge.*" Yang artinya: *Adele* itu adalah perilaku yang tidak memilih-milih atau membeda-bedakan dan menyamaratakan semua orang.

Menurut Kepala Desa Tanarigella sikap *adil* sama halnya sikap proporsional, tidak harus dibagi sama rata, tetapi

menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. nilai lokal adele ini adalah hal yang sangat penting untuk pahami oleh setiap pemimpin secara luas dan dapat menjadi sandaran atau landasan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, terkhusus di Desa Tanarigella. Karena disamping mengajarkan nilai-nilai kebaikan, juga merupakan bentuk warisan nenek moyang dari Kerajaan Luwu sehingga sudah menjadi kewajiban untuk dijaga dan dilestarikan oleh para generasi penerusnya.

Sikap jujur (lempu) adalah sebuah sikap yang berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas. Kejujuran dalam kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan yang lurus hati, tulus dan ikhlas. Sikap jujur merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu. Dalam arti lain kejujuran adalah nilai kebaikan sebagai sifat positif yang diterima semua orang manapun dan kapanpun.

Nilai lempu yang di pahami oleh Kepala Desa yaitu tidak mengeluarkan perkataan bohong, menjalankan amanah yang telah diberikan, apa adanya, meluruskan hal-hal yang bermasalah dan menempatkan sesuatu pada tempatnya serta terbuka dalam hal apapun.

Sedangkan sikap getteng (teguh) dipahami oleh Kepala Desa yaitu tidak meninggalkan janji atau komitmen yang telah dibuat, konsisten dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, tegas dalam menindaki yang pantas dan tidak merubah apa yang telah diputuskan. Adanya kesadaran akan pentingnya nilai lokal tersebut merupakan salah satu hal yang mengindikasikan bahwa para pemimpin pemerintahan termasuk Kepala Desa paham tentang nilai lokal yang ada. Nilai budaya lokal adele, lempu dan getteng merupakan suatu konsep nilai yang sangat penting untuk

dipahami bahkan dilaksanakan oleh para pemimpin pemerintahan khususnya di Desa Tanarigella. Oleh karena selain sebagai bentuk warisan luhur dari nenek moyang Kerajaan Luwu juga nilai lokal tersebut sangat relevan dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti yang luhur. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam bertindak dan berperilaku utamanya dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar serta masih bersandar pada kearifan lokal daerah.

Penerapan Nilai-nilai Lokal pada Kepemimpinan Kepala Desa dalam Bidang Pelayanan di Desa Tanarigella

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Terkait dengan penelitian ini penerapan yang dimaksud adalah tindakan dan pelaksanaan tentang konsep nilai-nilai lokal adele, lempu dan getteng oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang dituangkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi.

Salah satu tupoksi dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, hal ini didasarkan pada ayat (4) Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi dengan baik dalam bidang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan atas pemahaman akan nilai lokal tersebut.

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan

agar dapat terselenggara dengan efisien. Selanjutnya agar terjadi ketertiban diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Kegiatan peraturan itulah yang disebut administrasi, yang perlu dikendalikan atau dipimpin oleh seorang pemimpin.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 2011).

Penerapan ketiga nilai lokal tersebut dilaksanakan dalam 3 bentuk pelayanan, yaitu pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pertama, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat umum. barang-barang publik (public goods) dan layanan publik (public service). Barang-barang publik adalah barang-barang yang dapat digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa seorangpun dikecualikan dalam menggunakannya. Sedangkan layanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorangpun dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan untuk pembuatan KTP, SIM, SKCK, sertifikat tanah, surat keterangan miskin, dan lain-lain.

Hal yang dilakukan Kepala Desa dalam bidang pelayanan publik diantaranya Kepala Desa melakukan perubahan terhadap susunan struktur organisasi pemerintahan desa, pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan secara merata ke seluruh bawahan dan sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kemudian mengevaluasi kinerja mereka dalam rangka pembinaan karir secara adil dan tanpa membeda-bedakan. Pemerintah Desa saat ini tengah berupaya

untuk membenahi Desa Tanarigella dalam hal pengoptimalisasian fungsi kantor desa, aparat desa serta pelayanan Perilaku ini tentu mengandung sikap adil, jujur dan teguh Kepala Desa.

Kedua, pelayanan pembangunan. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa.

Penerapan ketiga nilai dalam pelayanan pembangunan dilaksanakan Kepala Desa dalam hal melakukan pemerataan pembangunan di Desa Tanarigella. Selain tanggul sungai yang dibangun, rencananya juga akan dibangun jalan-jalan kecil akses menuju Masjid Jami. Pembangunan tidak hanya dipusatkan pada Dusun Pasang Bua sebagai induk dari Desa Tanarigella saja, melainkan merata ke seluruh penjuru desa.

Selain perencanaan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa yang sebagian besar adalah program desa fisik, pemerintah desa juga tidak lupa dalam membuat program non-fisik di bidang keagamaan. Dalam proses penanaman moral etika dalam masyarakat, pemerintah desa membentuk Taman Pendidikan Keagamaan untuk anak-anak di Desa Tanarigella. Program tersebut melibatkan beberapa tenaga ahli yang mampu mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak.

Ketiga, pelayanan perlindungan yaitu pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat desa. Pemerintah desa harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan, kerusakan dan bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, kekerasan, konflik antar warga atau antar kampung, dan lain-lain.

Penerapan nilai-nilai lokal dalam bidang pelayanan perlindungan dilakukan Kepala Desa adalah membentuk Desa Siaga. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 24 jam, berupa perlindungan kesehatan, pelayanan administratif (jika sangat mendesak) terkhusus pelayanan perlindungan. Selama menjabat, Kepala Desa mampu mengurangi jumlah konflik antar pemuda Desa Tanarigella dengan desa lain dibandingkan dengan pemerintahan desa yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan upaya merubah mainset pemuda bahwa pendidikan seseorang tidak hanya berhenti sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) saja, kemudian menganggur atau langsung bekerja menjadi buruh pabrik yang ada di Kecamatan Bua, melainkan dapat dilanjutkan ke Perguruan Tinggi. Kebanyakan pemuda Desa Tanarigella yang terlibat dalam konflik antar warga karena tidak mempunyai kegiatan atau kesibukan di desa, oleh sebab itu dengan merubah mainset pemuda tersebut, diharapkan para pemuda Desa Tanarigella dapat menyibukkan diri dengan kegiatan perkuliahannya.

Kemudian langkah antisipatif lainnya yang diambil oleh Kepala Desa untuk mengurangi intensitas pertemuan antar pemuda yaitu menunda untuk mendirikan pos kamling (pos keamanan lingkungan) dan bengkel pemuda karena dikhawatirkan tempat-tempat tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh pemuda, seperti berkumpul untuk minum-minuman keras dan merencanakan sesuatu. Kemudian langkah lainnya yang diambil oleh Kepala Desa dalam pengurangan jumlah konflik yaitu dengan memberdayakan pemuda-pemuda desa untuk menjadi aparat desa jika dianggap mampu dan menjadi kader pemberdayaan.

Pelayanan pemerintah desa tersebut berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintah desa, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service

function), melakukan pembangunan (development function) dan menciptakan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat (protective function). Wujud konkret dari pelaksanaan pelayanan yang baik dengan mengutamakan tiga nilai lokal terhadap masyarakat akan berdampak nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak yang paling dirasakan pertama adalah kepuasan masyarakat terhadap keberadaan pemerintahannya.

Masyarakat desa akan merasa puas karena masalah bersama yang mereka hadapi dapat terpecahkan berkat pelayanan yang mudah, cepat, murah dan baik dari pemerintah desa. Selanjutnya, jika semua urusan mendapatkan pelayanan prima, maka segala sesuatunya akan berjalan lancar yang pada gilirannya akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemahaman Kepala Desa tentang ketiga nilai lokal yaitu *adele* yaitu proporsional. Kedua, *lempu* yaitu terbuka dan ketiga *getteng* yaitu ketegasan dan teguh dalam pendirian. Kepala Desa hanya memahami ketiga nilai lokal tersebut berdasarkan pemahaman secara universal dan harfiah saja, tetapi tidak memahami secara paham lontara'.

Penerapan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa dilaksanakan dalam tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan publik berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan publik, kedua pelayanan pembangunan berupa pembangunan fisik dan non-fisik dan ketiga pelayanan perlindungan sebagai upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Aprilia Theresia., Krisnha S. Andini., Prima G.P Nugraha., Totok Mardikanto. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Anwar, Idwar. (2000). *Sejarah Luwu*. Palopo: Pustaka Sawerigading.
- Fadillah, Moh. Ali dan Sumantri, Iwan. (2000). *Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeolog, Sejarah dan Antropologi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Institut Etnografi Indonesia.
- Istianto, Bambang. (2011). *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kaloh, J., (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana Syafii, Inu. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhammad. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lijan Poltak Sinambela, (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mallondjo, Sioja Daeng. (2008). *Kedatuan Luwu (Catatan Tentang Sawerigading, Sitem Pemerintahan dan Masuknya Islam*. Palopo: Pustaka Sawerigading.
- Mansyur, Radjab. (2014). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Safaria, Triantoro. (2004). *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujadi, Sujadi. (2015). *Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Wasistiono, Sadu., Tahir, Irwan. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Zaini Mustakim, Mochammad. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Zid, Muhammad., Tarmiji Alkhudri, Ahmad. *Sosiologi Desa*. (2016). Jakarta: Raja Grafindo Persada.